



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/04/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 120/M.PPN/HK/10/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT
(DESK PAPUA)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua) di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT (DESK PAPUA).**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (DESK PAPUA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Desk PAPUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEDUA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 25 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 50/M.PPN/HK/04/2019
TANGGAL 8 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT (DESK PAPUA)

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Pertanian;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Gubernur Provinsi Papua;
9. Gubernur Provinsi Papua Barat;
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Deputi ...

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 18. | Deputi Bidang Pemantauan, Pengendalian Pembangunan, PPN/Bappenas; | Evaluasi dan Kementerian |
| 19. | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; | |
| 20. | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penganggulan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas; | |
| 21. | Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas; | |
| 22. | Sekretaris Daerah Provinsi Papua; | |
| 23. | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. | |

B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

1. KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Ketua : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

2. KELOMPOK KERJA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN /Bappenas.

Sekretaris : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota : 1. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

3. KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

4. KELOMPOK KERJA BIDANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN

- Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

5. KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris ...

Sekretaris : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

6. BIDANG DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN KOORDINASI

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ir. Budi Hidayat, M.Eng,SC, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Diah Lenggogeni. ST. M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dewi Sri Soetijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Rizky Sammyho Putera, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Alen ...

19. Alen Armenita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Ir. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yudianto, ST, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Mohamad Rahmat Mulianda, S,Pi, M.Mar, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Riya Farwati. ST. M.SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ir. Nita Kartika. M.Ec, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kiki Meiriska Rachmayani, SIP, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Arief Wiroyudho, S. Kom,, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Erna Gustina Norrista, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Ir. R. Wahanudin, M. Med. Sc (PH), Kementerian PPN/Bappenas;
36. Indra Wicaksosno, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Zaky Mas'ul, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Mohammad Zulfikar Arifi, SKNI, Kementerian PPN/Bappenas;

41. Mirna ...

41. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Fajar Sumirat, ST, M.Mar.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Rosianna, ST, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Syifa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Ade Nurani, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kamin, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Ichsan Fadli, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmiatun